

Peran Institusi Pemerintah Dan Masyarakat Di Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mohammad Yunus¹, Suratman²

yunusmohammad222@gmail.com¹

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak: Pendidikan merupakan faktor kunci dalam kemajuan suatu bangsa, namun peningkatan mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, kualitas pengajaran, dan infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, berdasarkan tinjauan literatur yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, kebijakan pendidikan, dan laporan lembaga terkait. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan pendidikan, pengelolaan anggaran, serta pembinaan tenaga pendidik. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama dalam bentuk partisipasi aktif melalui dukungan finansial, penguatan peran komite sekolah, dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat terbukti dapat meningkatkan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya pendidikan berkualitas yang lebih merata di Indonesia.

Kata kunci: Kolaborasi, Pemerintah, Masyarakat, Mutu Pendidikan, Partisipasi

Abstract: Education is a key factor in the progress of a nation; however, improving the quality of education in Indonesia still faces various challenges, such as disparities in access, teaching quality, and limited infrastructure. Therefore, collaboration between the government and society is crucial to achieving better and more equitable education quality. This study aims to analyze the roles of the government and society in improving the quality of education, based on existing literature. The method used in this research is library research, gathering data from books, academic journals, education policies, and reports from relevant institutions. The findings show that the government plays a significant role in providing education policies, managing budgets, and training educators. Meanwhile, society also plays an equally important role, particularly in the form of active participation through financial support, strengthening the role of school committees, and collaboration in the learning process. The synergy between the government and society has proven to enhance access to education, the quality of learning, and oversight of the implementation of education policies. These findings suggest that a closer collaboration between the government and society can accelerate the realization of more equitable and quality education in Indonesia.

Keywords: Collaboration, Government, Society, Education Quality, Participation

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Melalui pendidikan yang bermutu, generasi muda dapat dibentuk menjadi individu yang cerdas, kompeten, dan memiliki karakter yang kuat, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Mutu pendidikan tidak hanya menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan sosial, ekonomi, dan

budaya. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif, negara-negara berlomba-lomba untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi guna menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa (Budijanto & Rahmanto, 2021; Fajar, 2024).

Namun, meningkatkan mutu pendidikan

di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Berbagai tantangan terus dihadapi oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang kekurangan fasilitas pendidikan dasar seperti sekolah, ruang kelas, buku, dan alat pembelajaran (Gusniati et al., 2024). Selain itu, kualitas tenaga pengajar juga menjadi persoalan penting. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensinya, terutama dalam menghadapi perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi.

Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat turut menjadi faktor penghambat. Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang masih dirasakan mahal, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Aristin, 2015; Zurwandy et al., 2023). Masalah lainnya adalah manajemen sekolah yang belum optimal, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran institusi pemerintah sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang bermutu (Irshadi & Ivanna, 2024; Selviana et al., 2024). Melalui kebijakan-kebijakan strategis seperti alokasi anggaran pendidikan yang besar, pengembangan kurikulum nasional, dan program sertifikasi guru, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari komunitas pendidikan, masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai cara, mulai dari pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan

hingga dukungan finansial dan moral kepada sekolah-sekolah di daerah mereka (Tujiyono, 2023). Salah satu bentuk kontribusi masyarakat yang paling nyata adalah melalui komite sekolah, di mana orang tua murid dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat lokal.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas (Firmansyah et al., 2024). Keduanya harus saling mendukung dan melengkapi peran masing-masing. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan bertugas menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, sementara masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan tersebut. Sinergi ini akan semakin efektif jika diiringi dengan komunikasi yang baik antara kedua pihak, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran institusi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan menganalisis kontribusi masyarakat dalam mendukung upaya tersebut. Penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam bagaimana pemerintah, melalui kebijakan dan program-program strategisnya, dapat menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan sekolah maupun melalui peran mereka sebagai pengawas independen.

Penelitian ini penting karena mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dengan memahami peran pemerintah dan masyarakat secara mendalam, diharapkan dapat ditemu-

kan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan agar dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis peran institusi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang mendalam dan eksploratif, memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber literatur guna memahami konsep, kebijakan, dan praktik yang relevan. *Library research* difokuskan pada pengumpulan data sekunder yang tersedia dalam bentuk dokumen tertulis yang telah dipublikasikan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan institusi pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Buku-buku yang digunakan mencakup teori pendidikan, kebijakan publik, dan studi kasus yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Artikel jurnal ilmiah dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya dengan topik penelitian, khususnya yang membahas sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pendidikan. Selain itu, dokumen kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Peraturan Menteri Pendidikan, dan laporan resmi program pendidikan, juga dianalisis untuk memahami kerangka kerja regulasi yang mendukung mutu pendidikan. Laporan institusi pendidikan, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, digunakan untuk melengkapi data empiris tentang partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dengan pendekatan deskriptif-kritis. Pendekatan ini memungkin-

kan peneliti untuk menggali isi dokumen secara mendalam dan menginterpretasikan data dengan kritis untuk mendapatkan wawasan baru. Proses analisis meliputi identifikasi tema-tema utama, kategorisasi informasi, dan sintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran institusi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan serta implikasinya bagi kebijakan dan praktik pendidikan di masa depan.

Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitasnya (Rasidi & Ernaliana, 2021). Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah implementasi kebijakan pendidikan yang diarahkan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (Inkiriwang et al., 2020). Pemerintah juga mengadopsi pendekatan desentralisasi pendidikan melalui kebijakan otonomi daerah, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebijakan ini berfungsi untuk mempersempit kesenjangan pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Selain itu, pemerintah meluncurkan berbagai program unggulan yang dirancang untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Salah satu program yang sangat signifikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini memberikan dana kepada sekolah untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional, seperti pembelian buku, perbaikan-

an fasilitas, dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (Nursiniah & Aliyyah, 2024). Melalui BOS, pemerintah tidak hanya meringankan beban finansial keluarga, tetapi juga memastikan sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, program BOS juga didukung oleh mekanisme pelaporan yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan efektivitasnya.

Program lain yang tidak kalah penting adalah sertifikasi guru, yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Guru yang kompeten memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa (Sartika et al., 2018). Sertifikasi guru diwujudkan dalam bentuk uji kompetensi yang mengukur kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Selain sebagai bentuk pengakuan atas profesionalisme, sertifikasi juga memberikan insentif berupa tunjangan bagi guru yang memenuhi standar. Dengan cara ini, pemerintah mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik, sekaligus memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kapasitasnya.

Dalam aspek kurikulum, pemerintah secara konsisten melakukan pembaruan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Salah satu inisiatifnya adalah penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang kemudian berkembang menjadi Kurikulum 2013 (K13) dan terbaru, Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk menekankan pengembangan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menyusun program pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik (Ruswan et al., 2023). Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diharapkan menguasai materi akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan juga terlihat dari program-program lain seperti Indonesia Pintar, yang

membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah, serta berbagai pelatihan dan pendampingan bagi kepala sekolah dan pengawas untuk memperkuat manajemen pendidikan. Selain itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun telah banyak capaian positif, masih terdapat tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah, seperti kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program di lapangan. Namun, melalui kebijakan yang terarah, dukungan anggaran yang memadai, dan kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak, pemerintah terus berupaya menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap mutu pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global.

Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang bermutu tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah (Maujud, 2017). Salah satu bentuk kontribusi yang paling nyata dari masyarakat adalah dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, seringkali turut mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh pemerintah. Misalnya, dalam bentuk sumbangan dana, perbaikan bangunan sekolah, atau penyediaan peralatan pendidikan seperti buku, komputer, dan alat olahraga. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga masyarakat seperti yayasan pendidikan, kelompok pengusaha, dan organisasi sosial juga turut mendukung

pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan adanya partisipasi ini, sekolah-sekolah yang sebelumnya kekurangan sarana, bisa mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola dan mendukung keberlanjutan fasilitas yang sudah ada. Dalam banyak kasus, masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan gedung sekolah dan fasilitas lainnya, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan (Khikmah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas, tetapi juga dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan penggunaan fasilitas tersebut.

Peran masyarakat lainnya yang tak kalah penting adalah keberadaan komite sekolah. Komite sekolah berfungsi sebagai wadah yang menghubungkan antara sekolah dan masyarakat (Supardi et al., 2023). Komite ini terdiri dari perwakilan orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Salah satu peran utama komite sekolah adalah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Komite sekolah berperan dalam mengorganisir berbagai kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat, seperti pertemuan orang tua murid, penggalangan dana untuk kebutuhan sekolah, dan pelatihan atau seminar untuk orang tua terkait pendidikan anak. Komite sekolah juga dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi orang tua siswa kepada pihak sekolah dan pemerintah, serta untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai program-program yang dijalankan oleh sekolah.

Selain itu, komite sekolah juga berperan dalam mendukung keberagaman program pendidikan yang ada di sekolah (Wulan et al., 2023). Sebagai contoh, komite dapat membantu dalam pengorganisasian program-program ekstra kurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan siswa di luar pelajaran utama. Program-program ini, seperti

seni, olahraga, dan kegiatan keagamaan, sangat penting untuk pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Dengan adanya dukungan dari komite sekolah, program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik, bahkan dengan dana atau bantuan lainnya yang diperoleh dari sumbangan masyarakat.

Peran komite sekolah juga sangat penting dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Komite sekolah dapat memantau dan memastikan bahwa dana yang diterima oleh sekolah, baik dari pemerintah maupun masyarakat, digunakan dengan tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Kartono et al., 2024). Melalui pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah, diharapkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat tercapai, sehingga masyarakat merasa lebih percaya terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, baik melalui penyediaan fasilitas maupun melalui peran aktif komite sekolah, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, maka kualitas pendidikan itu sendiri akan semakin berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari pengadaan fasilitas hingga partisipasi dalam kegiatan sekolah. Hal ini tidak hanya memperbaiki kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan pendidikan bangsa.

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Larasati et al., 2022). Kedua pihak ini saling bergantung dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah berfungsi sebagai penyedia kebijakan dan

sumber daya, sementara masyarakat bertindak sebagai mitra yang memberikan dukungan langsung terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas pendidikan dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dijangkau dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa daerah, terdapat contoh keberhasilan kolaborasi yang dapat menjadi model untuk daerah lain.

Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi meningkatkan kualitas pendidikan melalui program "Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP)". Program ini melibatkan masyarakat dalam mendanai pembangunan infrastruktur sekolah dan memberikan dukungan terhadap kegiatan belajar mengajar. Pemerintah daerah, bersama dengan masyarakat setempat, membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik, seperti ruang kelas yang layak dan perpustakaan yang memadai (Maulido et al., 2024). Selain itu, orang tua siswa juga dilibatkan dalam kegiatan belajar, misalnya dengan mendampingi anak-anak mereka di rumah untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang optimal. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kelulusan dan prestasi siswa di tingkat regional.

Di daerah lain, seperti beberapa pemerintah daerah melakukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga menunjukkan hasil yang positif. Dimana beberapa pemerintah daerah meluncurkan program "Sekolah Gratis" yang didukung oleh berbagai organisasi masyarakat dan dunia usaha (Huda et al., 2023). Melalui program ini, biaya pendidikan di sekolah negeri di Surabaya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bahkan oleh keluarga dengan ekonomi terbatas. Kolaborasi ini tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas tambahan seperti komputer dan buku pelajaran. Program ini menunjukkan bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Namun, meskipun ada keberhasilan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat

dalam pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor pendukung utama adalah kesadaran dan komitmen dari kedua belah pihak. Ketika pemerintah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap sektor pendidikan, misalnya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan memberikan pelatihan kepada guru, masyarakat cenderung lebih percaya dan mau terlibat. Selain itu, dukungan dari lembaga non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat dan dunia usaha, dapat memperkuat kolaborasi ini dengan menyediakan sumber daya tambahan.

Namun, beberapa faktor penghambat juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketidaktepahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sering kali menghambat tercapainya tujuan bersama. Misalnya, pemerintah mungkin tidak sepenuhnya menginformasikan masyarakat tentang kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi di beberapa daerah menyebabkan masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah kesulitan untuk berpartisipasi dalam program-program pendidikan yang ada. Faktor lain yang menghambat adalah kurangnya kapasitas dan pengetahuan di tingkat pemerintahan daerah untuk mengelola kolaborasi ini secara efektif.

Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala, terutama di daerah-daerah terpencil. Di beberapa tempat, meskipun masyarakat ingin berpartisipasi, mereka tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk memberikan kontribusi secara maksimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu lebih intens dalam memberikan pelatihan dan membangun kapasitas masyarakat agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki potensi yang besar, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap faktor pendukung dan

penghambat yang ada. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pendidikan yang berkualitas.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat saling terkait dan saling melengkapi. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator kebijakan pendidikan dengan merancang regulasi yang mendukung kualitas pendidikan, menyediakan anggaran yang cukup, serta mengembangkan dan melaksanakan program-program nasional yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, seperti sertifikasi guru dan penyediaan fasilitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat berperan sebagai mitra strategis yang tidak hanya memberikan dukungan finansial melalui dana partisipatif atau *corporate social responsibility* (CSR), tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi pendidikan di tingkat lokal, termasuk melalui komite sekolah dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat. Dialog terbuka dan kerjasama yang lebih intens antara kedua pihak akan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengawasi proses pendidikan. Dengan adanya peningkatan kapasitas dari kedua belah pihak, maka mutu pendidikan dapat lebih optimal dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud secara lebih merata.

Daftar Pustaka

Aristin, N. F. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20(1), 30–36. [https://doi.org/](https://doi.org/10.17977/um017v20i12015p030)

- 10.17977/um017v20i12015p030
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57–74. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>
- Fajar, A. (2024). Politik Hukum Anggaran Negara Di Bidang Pendidikan Nasional Sebagai Perwujudan Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(2), 1303–1324.
- Firmansyah, M. D., Sugihartini, D. P., & Rachman, I. F. (2024). Transformasi Pendidikan Melalui Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Untuk Literasi Digital Demi Pembangunan Berkelanjutan 2030. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 317–327. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i4.1246>
- Gusniati, J., Jahera, J., Zulkifli, A., & Ananda, R. (2024). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Yang Efektif. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 11(2), 572–582. <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v11i2.4324>
- Huda, S., Sugandi, Y. S., & Sumadinata, W. S. (2023). Inovasi Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 519–528. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2526>
- Inkiriwang, R. R., Singal, R., & Roeroe, J. V. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(32), 73–92.
- Irshadi, F., & Ivanna, J. (2024). Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di Palu, Sulawesi Tengah: Kebijakan Publik untuk Membangun SDM Unggul. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 19921–19932.

- Kartono, S. M. A. N., Ariyah, Viana, V. O., & Kolis, N. (2024). Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan Di SMP N 2 Boja Kendal. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 3744–3755. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13921>
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 14–21. <https://doi.org/10.17977/um027v3i2-2020p123>
- Larasati, N., Apriliana, S. M. A., Sapitri, I. N., Supriyadi, & Izzatika, A. (2022). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Pedagogika: Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan*, 10(1), 12–17. <https://doi.org/10.30598/pedagogikavol12issue2page309-318>
- Maujud, F. (2017). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan Kota Mataram). *Palapa*, 5(2), 92–121. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.48>
- Maulido, S., Karmijah, P., & Rahmi, V. (2024). Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Di Daerah Terpencil. *Jurnal Sadewa: Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2(1), 3021–7377. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i1.488>
- Nursiniah, S., & Aliyyah, R. R. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2832–2855. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12275>
- Rasidi, M. A., & Ernaliana. (2021). Standar Kualitas Pendidikan Dasar Di Nigeria: Studi Kepustakaan. *El Midad: Jurnal PGMI*, 13(1), 41–49. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v13i1.3456>
- Ruswan, A., Rosmana, P. S., Oktafrina, A., Rahmawati, A., Apriliani, D., Nurfaoziah, K., ... Zahra, N. V. (2023). Penerapan Kurikulum Merdeka dengan Model Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31676–31684. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12175>
- Sartika, S. H., Dahlan, D., & Waspada, I. (2018). Kompetensi Guru Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Melalui Kebiasaan Belajar Siswa. *Jurnal MANAJERIAL*, 17(1), 39–51. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v17i1.9760>
- Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Fachri, M. R., & Ramadhan, S. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation : Journal of Law*, 3(2), 44–51. <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004>
- Supardi, Qurtubi, A., & Fatoni, H. (2023). Kemitraan Sekolah dan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP IT Raudhatul Jannah Cilegon. *Journal on Education*, 5(4), 11196–11203. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2053>
- Tujiyono, T. (2023). Peran Komite bagi Kemajuan Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Edukasi*, 1(1), 93–102. <https://doi.org/10.60132/edu.v1i1.111>
- Wulan, D. J., Mustoip, S., & Hidayati, N. (2023). Strategi Komunikasi Dalam Pembentukan Organisasi Komite Sekolah di TK Negeri Sendang Kabupaten Cirebon. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 177–195. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.411>
- Zurwanty, R. H., Indra, N., & Sari, V. P. (2023). Akses Pendidikan Anak Keluarga Miskin (Di Sungai Pisang Kota Padang). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 830–838.